

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Di Daerah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan

Ronaldi Ismail¹

Diterima :29 Desember 2015

Disetujui :29 Januari 2016

ABSTRACT

Problem faced by the government regarding Development and Management of Irrigation Network program is the implementation have many weakness, which look at the low participation. Including a sense of belonging is low to existing irrigation networks. Public already familiar with the system development from top to bottom (top down) and passive waiting for the program and existing orders. The aim of research is to analyze the form and level of society participation and to know what factors influence community participation in Development and Management of Irrigation Network program at Way Umpu Irrigation Area, Way Kanan regency. This research used quantitative descriptive analysis support with qualitative analysis. Based on this study, its found that the participation in form energy, money and material, dominant forms of community participation is energy, followed by donations of money and material donations. Overall level of public participation in Development and Management of Irrigation Network program at the third level of eight Arnstein participation ladder. its mean at informing level and degree of tokenism.

Keywords : Development and Management of Irrigation Network, community participation, internal and eksternal factors

.ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Way Kanan adalah pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan selama ini masih banyak kelemahannya, yang terlihat pada rendahnya partisipasi masyarakat. Termasuk didalamnya rasa memiliki yang relatif rendah terhadap jaringan irigasi yang ada. Hal ini tidak lain dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (top down). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dominan memberikan bentuk partisipasi berupa tenaga, kemudian diikuti sumbangan uang dan sumbangan material. Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi berada pada tingkat ketiga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkatan pemberitahuan dan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat pada tahapan penghargaan.

Kata kunci: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Partisipasi Masyarakat, Faktor internal dan eksternal

¹Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Bandar Lampung
Kontak Penulis : ronaldi_i@yahoo.com

PENDAHULUAN

Irigasi memiliki peranan penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional, khususnya dalam produksi beras nasional. Kementerian PU mengeluarkan Peraturan Menteri terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Diantaranya adalah Peraturan Menteri PU No. 30 tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Peraturan tersebut menjabarkan bahwa keberhasilan pembangunan di sektor pertanian harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Inti dari pengembangan dan pengelolaan irigasi yang bersifat partisipatif adalah mengembalikan rasa kepemilikan irigasi tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat terlibat sejak pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan yang ada semakin menambah tantangan yang tidak hanya harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten semata, tetapi keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolannya.

Kabupaten Way Kanan selama ini dikenal dengan sebutan “*bumi petani*” dikarenakan sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Way Kanan adalah dengan mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian di wilayah ini mempunyai peluang yang sangat besar sebagai andalan untuk ditingkatkan, potensi lahan persawahan didukung oleh banyaknya sungai-sungai yang ada, seperti Way Umpu dengan panjang sungai 100 Km dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1.179 km², Way Besai dengan panjang sungai 113 Km dengan DAS seluas 970 Km², Way Tahmi panjang 60 Km dengan DAS 550 Km² dan saluran Kanal Komering sepanjang 35 Km. Kabupaten Way Kanan juga termasuk salah satu dari 183 kabupaten lumbung pangan di Indonesia.

Keuntungan yang didapat dari program yang bersifat partisipatif adalah adanya *feedback* kepada pembuat kebijakan dari masyarakat tentang kelebihan dan kekurangan suatu program kegiatan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kedepannya. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar kebijakan publik yang dibuat benar-benar tepat sasaran memenuhi kebutuhan masyarakat. Imbas dari program yang berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat akan menghasilkan suatu program yang tepat sasaran. Masyarakat akan dengan senang hati turut serta bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut mensukseskan pembangunan. Selain itu, untuk menutupi kekurangan anggaran dalam pembangunan prasarana irigasi dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan mandiri untuk turut memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perkembangannya, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah dinilai hanya sekedar memberikan harapan bahwa program kerja yang bersifat partisipatif dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia akan meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan sesuai dengan keinginan masyarakat. Harapan dan janji yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui program yang bersifat partisipatif ini belum terealisasi dengan baik dan bersifat semu, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dan masih dalam tahapan derajat penghargaan.

Pembangunan prasarana irigasi selama ini di Kabupaten Way Kanan dianggap kurang menyerap aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek pembangunan, seringkali hanya menjadi objek pembangunan. Akibatnya masyarakat merasa tidak memiliki prasarana jaringan irigasi yang telah dibangun karena merasa tidak punya andil didalamnya. Kepemilikan dan Pengelolaan dianggap hanya menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah semata, sehingga prasarana irigasi yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menganut paradigma positivistik, karena cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi dan dapat disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan dengan melihat konteks sosial masyarakat dan pendekatan wilayah (spasial), mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Pendekatan dilakukan untuk melihat keadaan di masyarakat meliputi bentuk dan tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian.

Dalam Penentuan populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampel *Cluster Sampling*. Metode ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel dan juga dengan memperhatikan wilayah populasi, dipilih dengan cermat agar mewakili dari segala lapisan populasi.

KAJIAN TEORI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Secara etimologi, partisipasi berasal dari Bahasa Latin yaitu "participare" dan Bahasa Inggris "*participation*" yang bermakna mengambil bagian atau turut serta. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi adalah : hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Pengertian partisipasi memiliki banyak definisi, sejalan dengan beragam

Menurut Eugen C. Erickson dalam Suparjan dan Hempri Suyatno (2003), bahwa partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam pelabelan pada identitas diri mereka. Sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Jadi, partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Dari pengertian/definisi tentang partisipasi masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa inti dari partisipasi masyarakat adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat.

Sementara itu menurut Sanoff dalam Suciati (2007), tujuan utama partisipasi adalah: (1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum.

Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati. Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.nya pengimplementasian konsep tersebut.

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa : a) pikiran, b) tenaga, c) keahlian, d) barang dan e) uang. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu; a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, b) sumbangan spontanitas berupa uang dan barang, c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, e) sumbangan dalam bentuk kerja, f) aksi massa, g) mengadakan pembangunan di dalam keluarga dan h) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”(1969) bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, seperti berikut:

1. Manipulasi (Manipulation)

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai pembelajaran atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklaim bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

2. Terapi (Therapy)

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang. Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut

lebih banyak untuk mendapatkan masukan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah.

3. **Pemberian Informasi (Informing)**

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. **Konsultasi (Consultation)**

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survei mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuisioner.

5. **Penentraman (Placation)**

Strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan: (1) Kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; (2) Tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

6. **Kemitraan (Partnership)**

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah: (a) Adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat dimana pemimpin-pemimpinnya akuntabel; (b) Pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; (c) Ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.

7. **Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)**

Pada tingkat ini masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program pembangunan, yang berarti masyarakat mendapat pelimpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program

tertentu. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Dengan kesimpulan masyarakat memiliki wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

8. **Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)**

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipasi dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994).

Menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Pengaruh bertitik tolak kepada bagaimana kewenangan atau kekuatan pengaruh petaruh tersebut, pentingnya bertitik tolak pada permasalahan, kebutuhan dan kepentingan petaruh yang menjadi prioritas dalam program. Adapun untuk menganalisis hal tersebut, maka perlu: 1) menggambarkan daftar petaruh, 2) melakukan penilaian terhadap kepentingan tiap petaruh kepada kesuksesan program dan kewenangan petaruh, 3) mengidentifikasi resiko-resiko dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi desain program dan kesuksesan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

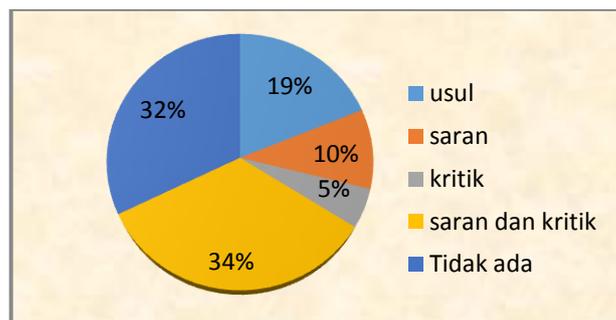
Berdasarkan data primer (kuisisioner) yang diperoleh, maka dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Daerah Irigasi Way Umpu dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Data pada tabel menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan sumbangan partisipasinya lebih dari 1 (satu) bentuk sumbangan. Sumbangan dalam bentuk tenaga saja diberikan oleh 9 responden (11%), sedangkan sumbangan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu berupa tenaga, uang dan material disumbangkan oleh 21 responden (26%). Responden yang memberikan sumbangan dalam 2 (dua) bentuk terdiri dalam 3 (tiga) jenis yaitu berupa sumbangan tenaga dan uang sebanyak 30 responden (38%), sumbangan tenaga dan material sebanyak 16 responden (20%) dan yang terkecil disumbangkan dalam bentuk uang dan material oleh 4 responden (5%).

TABEL 1.
BENTUK SUMBANGAN TENAGA, UANG DAN MATERIAL
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Tenaga	9	11%
2	Tenaga, uang dan material	21	26%
3	Tenaga dan uang	30	38%
4	Tenaga dan material	16	20%
5	Uang dan Material	4	5%
Jumlah		80	100%

Sumber: Hasil analisis, 2015

Sumbangan pikiran yang diberikan masyarakat adalah berupa usulan, saran dan kritik dalam forum pertemuan yang diadakan. Sebagian besar responden memberikan kritik dan saran seperti data pada Gambar 1. pada saat forum pertemuan berlangsung, ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki sikap kritis karena mereka merupakan masyarakat petani yang ikut terjun langsung pada kegiatan. Masyarakat juga memberikan saran dan kritik pada pertemuan sesuai dengan kondisi keadaan mereka dan dianggap benar dan sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kelompoknya, meskipun saran dan kritik yang diberikan belum tentu sejalan dengan konsep pembangunan yang benar.



Sumber: Hasil analisis, 2015

GAMBAR 1.
BENTUK SUMBANGAN PIKIRAN

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel sebagaimana diuraikan diatas, yaitu variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan,

sumbangan yang diberikan, keterlibatan dalam kegiatan fisik, keaktifan dalam diskusi dan keanggotaan dalam organisasi.

TABEL 2.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KESELURUHAN ASPEK
DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

No	Variabel	Skor Variabel	Tingkatan	Keterangan
1	Kehadiran dalam rapat/pertemuan	270	<i>Informing</i>	Masyarakat menghadiri rapat/pertemuan setelah adanya pemberian informasi dari pemerintah tentang manfaat program.
2	Sumbangan yang diberikan	276	<i>Informing</i>	Sumbangan hanya diberikan oleh masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.
3	Keterlibatan dalam kegiatan fisik	321	<i>Consultation</i>	Masyarakat terlibat dalam kegiatan fisik setelah usulan mereka diperhatikan
4	Keaktifan dalam diskusi	270	<i>Informing</i>	Keaktifan berdiskusi antara masyarakat dengan pemerintah melalui dialog/tanya jawab (semu).
5	Keanggotaan dalam organisasi	281	<i>Informing</i>	Keanggotaan masyarakat dalam organisasi apabila menguntungkan bagi mereka.
	Jumlah	1418	<i>Informing</i>	Masyarakat hanya diberikan informasi pentingnya partisipasi dalam program tanpa adanya peran dalam mengambil keputusan.

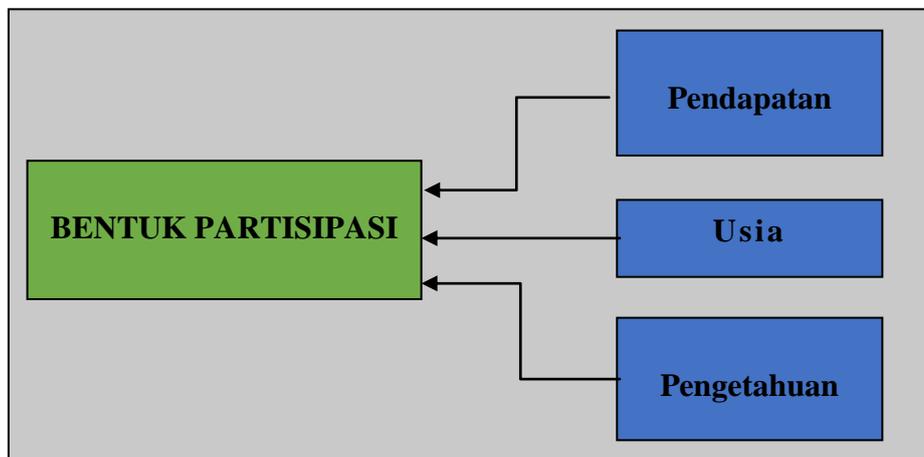
Sumber: Hasil analisis 2015

Pada tingkat *Informing* (pemberitahuan) dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Way Umpu merupakan tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan tokenism (penghargaan). Partisipasi masyarakat tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemegang kekuasaan (pemerintah). Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta berpendapat dan menyampaikan aspirasinya dan didengar oleh pemerintah, tapi masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan variabel diatas maka partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah dalam keterlibatan dalam kegiatan fisik mencapai jumlah tertinggi (321) dan yang paling rendah adalah Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dan Tingkat keaktifan dalam berdiskusi dengan jumlah terendah (270).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam bentuk partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil uji tabulasi silang dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dipengaruhi oleh faktor pendapatan, usia dan pengetahuan. Penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi sumbangan uang dan materi yang diperuntukkan untuk berpartisipasi dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah. Pada faktor usia, responden yang berumur cenderung rendah terhadap partisipasi tenaga dikarenakan keterbatasan kemampuan. berbeda dengan responden yang berumur dibawah 40 tahun yang memiliki kemampuan tenaga yang cukup. Faktor pengetahuan berpengaruh terhadap bentuk partisipasi sumbangan pikiran, dikarenakan masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap program mempunyai wawasan yang luas sehingga akan timbul ide-ide yang terkait dengan pemecahan masalah akan kondisi lapangan. berbanding terbalik dengan yang tidak memiliki pengetahuan yang cenderung diam saja dan bersifat pasif.



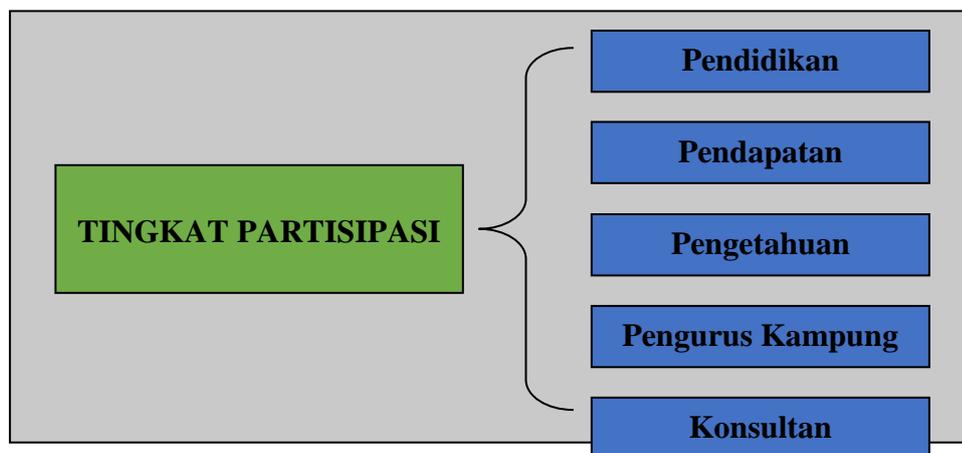
Sumber: Hasil analisis 2015

GAMBAR 2.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Dari hasil uji tabulasi silang dapat disimpulkan faktor eksternal tidak mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Peran pemerintah, tokoh masyarakat, pengurus kampung dan konsultan masih rendah dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam hal bentuk partisipasi. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan komunikasi yang intens antara masyarakat dengan penentu kebijakan (pemerintah), wakil masyarakat (tokoh), wakil pemerintah di wilayah kajian (pengurus kampung) dan perencana (konsultan).

Dalam tingkat partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil uji tabulasi silang dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah pendidikan, pendapatan dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat adalah peran pengurus kampung dan konsultan perencana.

Faktor pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi dikarenakan semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang program/kegiatan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Pendapatan masyarakat juga mempengaruhi tingkat partisipasi kehadiran dalam rapat pertemuan. Adanya hubungan tersebut karena tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena tidak disibukkan lagi dengan mencari dana tambahan penghasilan sehingga memiliki waktu luang untuk menghadiri rapat/pertemuan. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih memilih mengisi waktu luang untuk melakukan kegiatan yang dapat menambah penghasilan. Faktor Pengetahuan dominan berpengaruh pada keseluruhan aspek pada tingkat partisipasi masyarakat.



Sumber: Hasil analisis 2015

GAMBAR 3.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal bentuk partisipasi dalam sumbangan tenaga, uang dan material, masyarakat dominan memberikan bentuk partisipasi berupa tenaga dikarenakan pendapatan masyarakat yang tergolong rendah dan tidak menentu, kemudian diikuti sumbangan uang berupa iuran pokok dan iuran sukarela, sumbangan material banyak diberikan

dalam wujud konsumsi dan sebagian berupa bahan bangunan (material lokal seperti pasir, batu dan kerikil). Sedangkan bentuk sumbangan pikiran didominasi oleh saran dan kritik yang diberikan pada tahap perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan. Namun disisi lain, masih banyak masyarakat yang terkesan diam saja tidak memberikan sumbangan pikiran dan hanya ikut menyetujui dan menolak keputusan yang ada.

2. Tingkat partisipasi masyarakat di wilayah kajian dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dapat dilihat dari kehadiran dalam rapat/pertemuan, sumbangan yang diberikan, keaktifan dalam berdiskusi dan keanggotaan dalam organisasi berada pada tingkatan pemberitahuan dan hanya keterlibatan dalam kegiatan fisik yang berada pada tingkatan konsultasi. Sehingga secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi berada pada tingkat ketiga dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkatan pemberitahuan dan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat pada tahapan penghargaan.
3. Faktor-faktor internal terdiri dari pendidikan, pendapatan, usia, suku, agama dan pengetahuan. Berdasarkan analisis tabulasi silang, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor pendidikan, pendapatan, usia dan pengetahuan. Faktor pendidikan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi keaktifan dalam berdiskusi. Faktor pendapatan memberikan pengaruh pada bentuk partisipasi sumbangan uang, tenaga dan material dan tingkat partisipasi kehadiran dalam rapat/pertemuan. Faktor usia mempengaruhi pada bentuk partisipasi berupa sumbangan tenaga, uang dan material. Sedangkan faktor pengetahuan berpengaruh hampir terhadap semua bentuk dan tingkat partisipasi. Hanya faktor suku dan agama yang tidak memiliki hubungan dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.
4. Faktor-faktor eksternal terdiri dari pemerintah daerah, perangkat kampung, tokoh masyarakat dan konsultan. Berdasarkan analisis tabulasi silang, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor pengurus kampung dan konsultan. Faktor pengurus kampung berperan dalam mempengaruhi pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam hal kehadiran dalam rapat/pertemuan, Keterlibatan dalam kegiatan fisik dan Keaktifan dalam diskusi. Faktor konsultan hanya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi kehadiran dalam rapat dan pertemuan. Sedangkan faktor tokoh masyarakat dan pemerintah daerah relatif lebih kecil dalam hal mempengaruhi partisipasi masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemegang *kepentingan (stake holder)* adalah sebagai berikut :

1. Pemegang kepentingan (*stake holder*) hendaknya berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan antar tiap individu sehingga menjadi suatu komunitas yang memiliki satu kesatuan yang kokoh dan dapat lebih mandiri untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pembangunan.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dana masih dibutuhkan untuk mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan. Stimulus berupa dana diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk ikut dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dengan harapan nantinya masyarakat menyadari

bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan merupakan tanggung jawab bersama.

3. Masyarakat diharapkan dapat lebih diberdayakan dalam tahapan pembangunan irigasi dengan cara memberikan pelatihan, penyuluhan atau peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlibat dalam program tersebut.
4. Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh pemerintah, agar program ini berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Planning Association*, Volume 35, No. 4, Juli 1969
- Badan Pusat Statistik Kab. Way Kanan. 2014. *Way Kanan Dalam Angka 2014*. BPS Kabupaten Way Kanan.
- Bappeda Kabupaten Way Kanan, *Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan 2011- 2031*. 2012. Bappeda Kabupaten Way Kanan
- Suparjan, Hempri Suyatno 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods In Design And Planning*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suciati, et al, 2007, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Vol.2, Nomor 9, Agustus, hal.26-43.
- Sunarti 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok* *Jurnal Tata Loka*, Volume 5, Nomor 1, Januari, hal. 75-86